

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI KABUAPTEN/KOTA DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

NADYA AYU PRATIWI
2102110085



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NADYA AYU PRATIWI
NPM : 2102110085

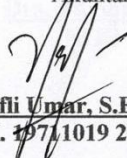
Dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI KABUPATEN/KOTA DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI ACEH**

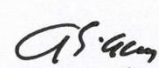
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

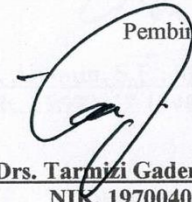
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II


Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NADYA AYU PRATIWI
NPM : 2102110085

Dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI KABUPATEN/KOTA DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 1 Februari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

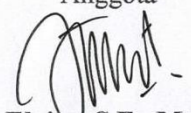
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

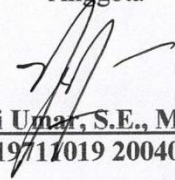
Sekretaris


Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota


Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 03 Februari 2024
Yang Menyatakan




Nadya Ayu Pratiwi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Ayu Pratiwi
NPM : 2102110085
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENDAPATAN ASLI KABUPATEN/KOTA DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Nadya Ayu Pratiwi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku wakil dekan I, Bapak Rusnaidi, S.E., M.Si. selaku wakil dekan II, dan Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak., C.A selaku dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, C.A, dan Ibu Elviza, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Dr. H. *Aliamin*, S.E., M.Si., Ak, CA dan Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.
6. Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ayahanda Sriyanto dan Ibunda Sri Sukrasni tercinta serta semua keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
8. Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Januari 2024

Penulis,

Nadya Ayu Pratiwi
NPM. 2102110085

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	10
1.3.1 Dana Alokasi Umum	14
2.3.1 Belanja Modal.....	15
2.2 Penelitian Sebelumnya	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dengan Belanja Modal.....	21
2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal ..	21
2.4 Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Definisi dan Operasional Variabel	26
3.4.1 Belanja Modal.....	27
3.4.2 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	27
3.4.3 Dana Alokasi Umum	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	29
3.6 Pengujian Hipotesis.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis.....	33
4.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	34

4.1.2.2	Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	35
4.1.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	35
4.1.3	Koefisien Determinasi	35
4.2	Pembahasan.....	36
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara Simultan terhadap Belanja Modal	36
4.3.2	Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota terhadap Belanja Modal.....	37
4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal..	38
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran.....	41
	DAFTAR PUSTAKA.....	42
	LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Modal.....	4
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	11
Tabel 2.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah	12
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian	25
Tabel 3.2 Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	32
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	22
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	45
Lampiran 2. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum Tahun 2020	46
Lampiran 3. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum Tahun 2021	47
Lampiran 4. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum Tahun 2022	48
Lampiran 5. Output Pengolahan Data	49

**THE INFLUENCE OF DISTRICT / CITY ORIGINAL INCOME AND
GENERAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES IN
DISTRICTS AND CITIES OF ACEH PROVINCE**

**NADYA AYU PRATIWI
2102110085**

Thesis Adviser : 1) Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si., Ak, CA
2) Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of district / city original income and general allocation funds on capital expenditures in districts and cities in Aceh Province. The method used in this research is multiple linear regression analysis method with quantitative approach. The object of this research is the district / city government of Aceh Province. The population in this study consisted of 18 districts and 5 cities in Aceh Province with a research period of 2020-2022. The results of this study indicate that district / city original income and general allocation funds simultaneously affect capital expenditure. Partially, district / city own-source revenue and general allocation funds both have an effect on capital expenditure.

Keywords: *capital expenditure, district/city own-source revenue, general allocation fund.*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI KABUPATEN/KOTA DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN
DAN KOTA PROVINSI ACEH**

**NADYA AYU PRATIWI
2102110085**

Pembimbing : 1) Dr. H. *Aliamin*, S.E., M.Si., Ak, CA
2) Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh dengan periode penelitian tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum sama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: belanja modal, pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan status otonomi khusus oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Salah satu aspek penting dari otonomi khusus Aceh adalah diberikan kewenangan untuk menjalankan, mengatur, dan mengurus seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerahnya sendiri, baik urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya otonomi khusus ini, Pemerintah Aceh diberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola pendapatan dan sumber daya alam tersebut guna membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

Daerah yang ditunjang dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai akan memberikan dampak positif pada produktivitas masyarakatnya. Selain itu, hal tersebut juga dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli kabupaten/kota (Waskito et al., 2019). Pendapatan asli kabupaten/kota merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wisnuwardana, 2023). Ketersediaan pendapatan asli kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pentingnya pendapatan asli kabupaten/kota menjadi faktor penentu dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli kabupaten/kota suatu daerah, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal meningkat. Peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga peningkatan belanja modal dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh meningkatkan belanja modal (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & Wuryani, 2022)

Namun demikian, faktanya adalah peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal. Diduga disebabkan oleh pendapatan asli kabupaten/kota Provinsi Aceh yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perbaikan dalam pengelolaan alokasi belanja modal dari pendapatan asli kabupaten/kota, terutama dengan pertimbangan peningkatan belanja modal yang diharapkan.

Di sisi lain, sebagaimana daerah otonomi lainnya di Indonesia, Aceh juga menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan untuk belanja modal pemerintah daerah untuk kegiatan memfasilitasi dan menyediakan sarana publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rosmayanti et al., 2023). Dana Alokasi Umum yang ditransfer dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan agar fokus pada penggunaan pendapatan asli kabupaten/kota untuk mendukung belanja modal yang menunjang upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Kuntadi et al., 2022). Ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah, terutama belanja modal sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana alokasi umum. Oleh karena itu, semakin tinggi dana alokasi umum, maka alokasi untuk belanja modal juga akan meningkat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa daerah dengan pendapatan (Dana Alokasi Umum) yang besar akan mengalokasikan lebih banyak dana untuk anggaran belanja modal. Hal yang relevan mengungkapkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh meningkatkan belanja modal (Siregar, 2022; Tiyas & Wuryani, 2022; Maharany & Nugroho, 2022; dan Srinofril & Ananda, 2023)

Namun demikian, faktanya dana alokasi umum di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan DAU tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada belanja modal. Realisasi belanja modal di beberapa kabupaten/kota Provinsi Aceh selama 3 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, meskipun jumlah dana alokasi umum terus bertambah setiap tahunnya. Diduga disebabkan oleh sebagian besar DAU yang digunakan oleh pemda untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah lainnya.. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengalokasian dana yang seharusnya di gunakan untuk kebutuhan umum dapat dialihkan untuk mendukung program pemerintah daerah yang mungkin tidak sesuai dengan urgensi atau prioritas nasional. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum yang diterima oleh

pemerintah daerah belum sepenuhnya dialokasikan untuk meningkatkan belanja modal yang berfokus pada infrastruktur dan fasilitas publik.

Belanja modal memiliki peran penting dalam menjalankan sistem pemerintahan karena dapat meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari *good governance* (Simanjuntak & Ginting, 2019). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi, di dalamnya termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Waskito et al., 2019). Belanja modal layak untuk diperhatikan lebih cermat karena bersifat investasi yang akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Semakin besar jumlah dan kontribusi belanja modal ini semakin baik untuk proses pembangunan.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (dalam Miliar)

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Belanja Modal	4,651.95	4,488.43	3,788.15
Persentase Alokasi Belanja Modal	16,37%	15,86%	13,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda aceh, 2022

Ironisnya, meskipun pemerintah aceh memiliki sumber pendanaan yang besar baik dari pendapatan asli kabupaten/kota maupun dana alokasi umum, realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh masih sangat rendah. Data menunjukkan persentase rata-rata kontribusi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Aceh hanya sekitar 13 – 16 persen, berada jauh dibawah

kontribusi belanja operasi. Alokasi ini dinilai cukup rendah dan mengkhawatirkan. Hal ini patut disayangkan mengingat belanja barang jasa mengalami peningkatan pada tahun tersebut (BPS, 2022). Pemerintah terlalu memfokuskan pada belanja barang dan jasa yang relatif kurang produktif sehingga belanja modal masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja barang. Pemanfaatan belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan. Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan distribusi belanja modal, mengingat ini cukup berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Karo, 2021).

Sumber pendanaan belanja modal berasal dari pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum (Rosmayanti et al., 2023). Tingginya dana alokasi umum dan pendapatan asli kabupaten/kota seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja infrastruktur melalui optimalisasi belanja modal. Namun, tidak semua dana tersebut selalu terealisasi dengan efektif dan tepat. Hal ini terlihat dari sejumlah infrastruktur di Aceh yang belum memenuhi standar atau belum memberikan pelayanan maksimal kepada publik. Salah satu contoh masalah nyata terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu kondisi jalan yang telah mengalami kerusakan parah selama 20 tahun tanpa perbaikan yang pernah dilakukan. Sebagaimana ditulis dalam laman www.kanalaceh.com. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Masalah lainnya berupa kurang memadainya infrastruktur dan berbagai permasalahan lain yang memerlukan perhatian. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum memberikan dampak yang signifikan terhadap belanja modal, karena dampaknya yang besar memiliki efek jangka

panjang terhadap pembangunan daerah. Pengalokasian pendapatan asli kabupaten/kota dan dana aloaksi umum untuk belanja modal perlu dilakukan secara efektif agar dapat mencapai masyarakat yang sejahtera dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini mencerminkan adanya korelasi antara pendapatan asli kabupaten/kota, dana alokasi umum, dan belanja modal. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memastikan arah hubungan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum dengan belanja modal. Hal ini karena beberapa penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil berbeda-beda. Pada penelitian terdahulu (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & Wuryani, 2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan penelitian lainnya menemukan pendapatan asli kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap belanja modal. (Siregar, 2022; dan Srinofril & Ananda, 2023).

Studi penelitian (Siregar, 2022; Tiyas & Wuryani, 2022; Maharany & Nugroho, 2022; dan Srinofril & Ananda, 2023) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian lain menemukan dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal (Uge & Finatariani, 2022; dan Ayem & Pratama, 2018).

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Namun penelitian dengan fokus kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih sangat terbatas. Selain itu terdapat perbedaan karakteristik perekonomian

dan keuangan antara kabupaten/kota yang berpotensi memengaruhi pola hubungan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di masing-masing daerah. Oleh karena itu penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota terhadap alokasi belanja modal dengan studi kasus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh perlu dilakukan.

Berdasarkan fenomena yang telahh dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
2. Apakah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Akademis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
- b. Bagi pembuat kebijakan (pemerintah), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemajuan daerah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menambah sumber referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan pada penilaian atas pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum dalam mengukur tingkat belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini terletak pada periode pengamatan data dari tahun 2020-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota

Salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pendapatan asli kabupaten/kota. Pendapatan asli kabupaten/kota adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk kebutuhan daerah (Fernandes & Putri, 2022). Pendapatan asli kabupaten/kota menunjukkan bagaimana suatu daerah bisa menghasilkan pendapatan, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wulandari & Emy, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pendapatan asli kabupaten/kota adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pendapatan asli kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Kabupaten/Kota:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah (perda), dimana kekuasaan pemungutan dijalankan oleh pemerintah daerah guna mencapai optimalisasi pemerintahan dan meningkatkan pembangunan wilayah tersebut (Ameilia & Syaifuddin, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jenis-jenis pajak dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pajak

Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Provinsi	Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Alat Berat (PAB) d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) e. Pajak Air Permukaan (PAP) f. Pajak Rokok g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) d. Pajak Reklame e. Pajak Air Tanah f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Sarang Burung Walet h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Panigoro et al., 2023:16).

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a. Pelayanan kesehatan b. Pelayanan kebersihan c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum d. Pelayanan pasar e. Pengendalian lalu lintas	a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila e. Pelayanan rumah potong hewan ternak f. Pelayanan jasa kepelabuhanan g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan	e. Persetujuan bangunan gedung f. Penggunaan tenaga kerja asing g. Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan (Suharyadi et al., 2018:127)

4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.1 Dana Alokasi Umum

Dalam Undang – Undang No.33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk meratakan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rahmitasari & Asyik, 2023). DAU bersifat Block Grant, artinya penggunaannya diberikan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kuntadi et al., 2022). DAU ditetapkan minimal 26% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota (Arina et al., 2019).

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,
- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan,

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas wilayah,
- c. Indeks kemahalan konstruksi,
- d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e. Indeks pembangunan manusia

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu Provinsi tertentu =

$$\frac{\text{Jumlah DAU Suatu Daerah Provinsi}}{\text{Provinsi}} \times \frac{(\text{Bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan})}{\text{Jumlah bobot dari seluruh provinsi}}$$

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu =

$$\frac{\text{Jumlah DAU Suatu Daerah Kabupaten/ Kota}}{\text{Kabupaten/ Kota}} \times \frac{(\text{Bobot Daerah Kab/Kota yang bersangkutan})}{\text{Jumlah bobot dari seluruh Kab/Kota}}$$

2.3.1 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa belanja modal ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut (Siregar, 2022) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal. Belanja dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal apabila:

- a. pengeluaran tersebut menyebabkan pembelian aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah
- b. pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. pembelian aset tetap tersebut dimaksudkan untuk tidak dijual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010, belanja modal dapat dikelompokkan dalam lima kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah ialah biaya untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, pengurangan, balik nama, sewa, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan biaya lainnya yang terkait dengan memperoleh hak atas tanah sampai tanah menjadi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian serta peningkatan kapasitas peralatan mesin dan investasi atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan) sehingga peralatan dan mesin yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan mencakup biaya yang dihabiskan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proses pembangunan gedung dan bangunan serta untuk meningkatkan kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut selesai dan siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk membeli, menambah, mengganti, dan meningkatkan pembangunan, pembuatan, dan perawatan. Ini termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan untuk meningkatkan kapasitas hingga jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, atau pembuatan benda fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori belanja modal seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga termasuk belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian seni, barang purbakala, dan untuk museum, dan pembelian hewan ternak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap belanja modal telah diteliti sebelumnya. Beberapa peneliti sebelumnya adalah Siregar, (2022) yang berjudul “Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal”. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 10 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sementara dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selanjutnya, Maharany & Nugroho, (2022) yang meneliti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 108 sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal

Tiyas & Wuryani, (2022) juga ikut meneliti yang berpengaruh terhadap belanja modal dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Sementara itu dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Modal. dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja Modal.

Uge & Finatariyani, (2022) meneliti dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020). Sampel yang digunakan teknik purposive sampling yaitu 8 kota dan kabupaten dengan pengamatan selama 4 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Srinofril & Ananda, (2023) meneliti dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan

Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021”. Sampel menggunakan metode total sampling dan di peroleh sebanyak 76 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Secara ringkas, penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Siregar, 2022)	Analisis regresi data panel	Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sementara dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Dana alokasi umum	Dana alokasi khusus dan retribusi daerah
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat (Maharany & Nugroho, 2022)	Analisis regresi linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum	Pengamatan tahun dan tempat
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur (Tiyas & Wuryani, 2022)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Sementara itu dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Modal. dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja Modal.	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum	Dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran
4	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Empir	Analisis regresi data panel	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan retribusi daerah dan dana	Dana alokasi umum	Pajak daerah dan retribusi daerah

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020) (Uge & Finatariyani, 2022)		alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.		
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021 (Srinofril & Ananda, 2023)	Analisis Regresi Data Panel	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum	Pengamatan tahun dan tempat

Sumber : Data diolah Tahun 2023

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan belanja modal sebagai variabel independen dan menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai instrumen penelitiannya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan daerah yang diteliti.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas menggunakan variabel pendapatan asli daerah, selisish lebih pembiayaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan dana perimbangan. Dana perimbangan didalamnya terdapat dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan pada penelitian sekarang difokuskan untuk menggunakan variabel dana alokasi umum karena dana alokasi umum dikhususkan untuk semua daerah di Indonesia. Sedangkan dana alokasi khusus hanya untuk daerah-daerah tertentu saja.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli kabupaten/kota merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang ada di

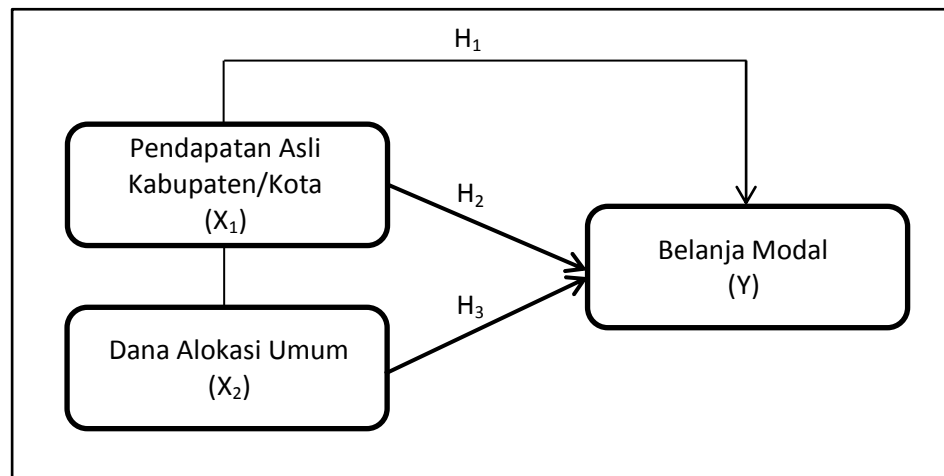
daerah. Pendapatan asli kabupaten/kota mencerminkan kemampuan daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (Rasyid, 2018).

Semakin meningkat biaya pendapatan asli kabupaten/kota maka semakin mampu daerah tersebut untuk mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan seperti penyediaan pelayanan publik, fasilitas umum, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Maharany & Nugroho, 2022). Dengan terjadinya hal tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut mampu untuk berjalan mandiri. Apabila terjadinya pendapatan asli kabupaten/kota meningkat maka pada investasi belanja modal pada pemerintahan daerah juga diharapkan dapat meningkat (Wisnuwardana, 2023) Upaya dalam peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota sebaiknya diiringi oleh peningkatan kualitas layanan publik oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Setiap daerah memiliki kapasitas keuangan yang berbeda-beda dalam mendukung kegiatannya, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum memiliki peran serupa dengan pendapatan asli kabupaten/kota, yaitu mendukung kebutuhan belanja daerah, termasuk belanja modal. Meskipun bersumber dari pemerintah pusat, DAU menjadi sumber pembiayaan utama bagi beberapa daerah. DAU berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja modal yang artinya semakin besar dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada

daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah (Siregar, 2022).



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variable yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

- H₁ : Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh
- H₂ : Pendapatan Asli Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh
- H₃ : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian atau rancangan suatu penelitian sangat berpengaruh dalam menentukan desain yang tepat, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan dalam menentukan desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan (Sekaran & Bougie, 2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh (Sekaran & Bougie, 2017:52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap variabel tidak bebas yaitu belanja modal.

2) Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau

lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh dipengaruhi oleh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum

3) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimum, karena peneliti tidak memiliki kemampuan mempengaruhi kondisi di dalam lembaga atau instansi yang bersangkutan dalam hal penilaian data. Oleh karena itu tingkat intervensi penelitian rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data sekunder dan selanjutnya menganalisis data tersebut

4) Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Penulis ingin mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli kabupaten/kota Dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

5) Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

6) Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross-*

sectional dengan periode pengamatan tahun 2020–2022. Studi yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu one shot atau cross sectional (Sekaran & Bougie, 2017:77). Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Selanjutnya, karena data tersebut berseri dari tahun 2020-2022 dan memiliki beberapa sub, maka horizon waktu dalam penelitian ini disebut data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dan data *cross sectional*

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:21). Atau dengan kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau subjek yang menjadi tugas penelitian untuk memberi batasan yang tegas terhadap setiap objek yang menjadi populasi penelitiannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Aceh yang meliputi 18 daerah Kabupaten dan 5 daerah Kota sehingga total populasi adalah 23. Secara ringkas populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 1.1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Aceh	18
2	Pemerintahan Daerah Kota Provinsi Aceh	5
Populasi		23
Periode Penelitian		3 Tahun
Jumlah Sampel Akhir (23 kabupaten dan kota selama 3 tahun)		69

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022

Pada penelitian ini pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (sensus) dengan memasukkan semua populasi menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2022.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota Provinsi Aceh yang terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden langsung. Data tersebut seperti buletin statistik, publikasi pemerintah dan informasi lain yang dipublikasikan disebut data sekunder (Sekaran & Bougie, 2017:77).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Aceh yang di akses melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu terdiri dari satu variabel tidak bebas (*dependent variabel*) dan dua variabel bebas (*independent variabel*). Variabel tidak bebas adalah Belanja Modal dan variabel bebas adalah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum.

3.4.1 Belanja Modal

Belanja modal adalah alokasi anggaran yang di gunakan untuk belanja aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berguna untuk menunjang kegiatan pemerintahan (Rivandi & Anggraini, 2022). Metode penghitungan belanja modal diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

3.4.2 Pendapatan Asli Kabupaten/Kota

Pendapatan asli kabupaten/kota adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk kebutuhan daerah (Fernandes & Putri, 2022). Variabel pendapatan asli kabupaten diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{PAK} = & \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan} \\ & \text{Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah} \end{aligned}$$

3.4.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Iqbal, 2022). Variabel dana alokasi umum diukur dengan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana:

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Ringkasan definisi dan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (X_1)	Pendapatan asli kabupaten/kota adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk kebutuhan daerah (Fernandes & Putri, 2022).	PAK = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah	Nominal
2.	Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Iqbal, 2022)	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana: Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal	Nominal
3.	Belanja Modal (Y)	Belanja modal adalah alokasi anggaran yang di gunakan untuk belanja aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berguna untuk menunjang kegiatan pemerintahan (Rivandi & Anggraini, 2022).	BM = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya	Nominal

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis, maka penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (multiple linear regression). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Saat menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 29.0. Regresi linier berganda dirumuskan dengan persamaan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Belanja Modal.

α = Konstanta.

b = Koefisien regresi.

X = Pendapatan Asli Kabupaten/Kota

X_2 = Dana Alokasi Umum

ε = Epsilon (error term).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1) Hipotesis Pertama

H_{01} : Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H_{a1} : Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2) Hipotesis Kedua

H_{02} : Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H_{a2} : Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3) Hipotesis Ketiga

H_{03} : Dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H_{a3} : Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Kriteria ini berpedoman pada Gani (2015:9) dan Supranto (2009:190). Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama:

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol (β_1 & $\beta_2 = 0$), maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol (β_1 & $\beta_2 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1 = 0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:

- Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($\beta_2 = 0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Hasil dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga.

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi dasar dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah Belanja Modal (Y), Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2). Pengujian ini menjelaskan nilai mean, minimum, dan maksimum, untuk setiap variabel. Hasil perhitungan statistik deskriptif bisa dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	69	12.36	256.92	118.3291
Dana Alokasi Umum	69	313.86	897.98	527.7187
Belanja Modal	69	72.63	340.82	187.3700
Valid N (listwise)	69			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli kabupaten/kota yaitu sebesar

118.3291. Nilai minimum pendapatan asli kabupaten/kota yaitu sebesar 12.36. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pendapatan asli kabupaten/kota terendah di kabupaten/kota Provinsi Aceh didapat oleh Kota Subulussalam tahun 2022. Selain itu ada juga nilai maksimum pendapatan asli kabupaten/kota sebesar 256.92 didapat oleh Kota Langsa tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata dana alokasi umum yaitu sebesar 527.7187. Nilai minimum dana alokasi umum yaitu sebesar 313.86. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, dana alokasi umum terendah di kabupaten/kota Provinsi Aceh didapat oleh Kota Subulussalam tahun 2021. Selain itu ada juga nilai maksimum dana alokasi umum sebesar 897.98 didapat oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata belanja modal yaitu sebesar 187.3700. Nilai minimum belanja modal yaitu sebesar 72.63. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, belanja modal terendah di kabupaten/kota Provinsi Aceh didapat oleh Kabupaten Simeulue tahun 2022. Selain itu ada juga nilai maksimum belanja modal sebesar 340.82 didapat oleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2022.

3.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hipotesis.

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	63.388	20.195		3.139	.003
	Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	.060	.146	.057	.411	.682
	Dana Alokasi Umum	.222	.053	.586	4.217	.000

R = 0,629; R² = 0,395; Adj- R² = 0,377; F = 21,589; Sig.F = 0.001^b

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat pada tabel 4.2, maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 63,388 + 0,60X_1 + 0,222X_2$$

3.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) masing-masing variabel adalah 0,060 untuk variabel pendapatan asli kabupaten/kota (β_1) dan 0,222 untuk variabel dana alokasi umum (β_2). Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,060 \neq 0$; dan $0,222 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

3.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah pendapatan asli kabupaten/kota berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) pendapatan asli kabupaten/kota sebesar 0,060. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,060 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

3.1.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) dana alokasi umum sebesar 0,222. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,222 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

3.1.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Berdasarkan

Tabel 4.2, nilai R Square sebesar 0,395. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal yaitu sebesar 39,5% ($0,395 \times 100\%$). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 60,5% ($100\% - 39,5\%$) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi belanja modal, baik itu kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum.

3.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum terhadap belanja modal baik secara simultan maupun parsial akan dibahas sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum secara Simultan terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semua semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$). Artinya hipotesis pertama (H_{a1}) diterima. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa, belanja modal pada Kabupaten/Kota Povinsi Aceh dipengaruhi oleh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum.

Pengaruh kedua variabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama tahun 2020-2022 telah membawa dampak perubahan terhadap belanja modal. Dampak perubahan yang terjadi pada belanja modal dipengaruhi oleh kedua indikator tersebut. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum

berperan atas peningkatan maupun penurunan pada belanja modal terhadap Kabupaten/Kota.

Peranan kedua faktor tersebut terlihat dari belanja modal. Perubahan yang terjadi baik itu kenaikan maupun penurunan belanja modal tersebut merupakan cerminan dari naik turunnya pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kedua variabel bebas ini secara simultan mempengaruhi belanja modal Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharany & Nugroho, (2022); dan Srinofril & Ananda, (2023) yang menyatakan bahwa secara simultan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Semua variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu memprediksi variabel terikat sebesar 39,5%. Selanjutnya sisa sebesar 60,5% lagi diprediksi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, pendapatan asli kabupaten/kota berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai koefisien beta (β_1) pendapatan asli kabupaten/kota sebesar 0,060. Nilai ini tidak sama dengan nol ($0,060 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a2} diterima. Artinya pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

Tingginya peningkatan belanja modal disebabkan karena pendapatan asli kabupaten/kota yang diperoleh juga tinggi. Pendapatan asli kabupaten/kota menjadi salah satu sumber dana utama untuk mendukung belanja modal. Semakin tinggi nilai pendapatan asli kabupaten/kota, maka semakin tinggi pula alokasi

belanja modal. Sumber pendapatan asli kabupaten/kota berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pelayanan publik atau meningkatnya sarana dan prasarana publik akan memicu peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maharany & Nugroho, 2022; dan Tiyas & Wuryani, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal, dimana pendapatan asli kabupaten/kota merupakan sumber pendapatan yang akan meningkatkan belanja modal.

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai koefisien beta (β_2) dana alokasi umum sebesar 0,222. Nilai ini tidak sama dengan nol ($0,222 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a3} diterima. Artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh peran dana alokasi umum yang terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum sebagai sumber utama pendanaan belanja modal, dengan tujuan menambah aset yang dapat meningkatkan pendapatan

daerah. Tingkat realisasi anggaran dana alokasi umum yang lebih tinggi akan berdampak pada peningkatan anggaran realisasi belanja modal. Dengan demikian untuk melakukan belanja modal, pemerintah Aceh masih mengandalkan dana transfer dari pusat yaitu dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar, (2022); Tiyas & Wuryani, (2022); Maharany & Nugroho, (2022); dan Srinofril & Ananda, (2023) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal, dimana dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan yang akan meningkatkan belanja modal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Pengaruh pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum tersebut berdampak pada fluktuasi alokasi belanja modal selama periode pengamatan. Kenaikan pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum berdampak pada meningkatnya belanja modal, begitupun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan pola belanja modal mencerminkan fluktuasi pendapatan asli kabupaten/kota dan dana alokasi umum secara simultan.
2. Pendapatan asli kabupaten/kota secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota berdampak pada meningkatnya alokasi belanja modal pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli kabupaten/kota maka semakin besar alokasi anggaran pemda untuk membiayai belanja modal. Dengan demikian, peningkatan pendapatan asli kabupaten/kota berdampak dalam mendukung peningkatan belanja modal.
3. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Ketergantungan pada dana alokasi umum

berdampak pada terhambatnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum sebagai sumber utama pembiayaan belanja modal dengan tujuan menambah aset publik guna meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi dana alokasi umum, maka semakin besar pula anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan dana alokasi umum berdampak langsung pada peningkatan belanja modal di daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyarankan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli kabupaten/kota, terutama yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pemerintah daerah disarankan mencari sumber pendanaan alternatif selain dana alokasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas data penelitian. Misalnya dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan variabel bebas lainnya yang berpengaruh besar terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameilia, A. I., & Syaifuddin, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(1), 66–80.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (2022). *Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2022*. Diambil kembali dari www.bps.go.id
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, (2022), Diambil kembali dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209.
- Gani, I., & Siti, A. (2015). *Alat Analisis data, aplikasi statistik untuk penelitian bidang ekonomi dan sosial*. Yogyakarta: Andi Offsate.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Iqbal, M. B. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *JEKMA*, 3(1).
- Kanalaaceh (2024, 14 Januari 2024). Miris! Jalan di Gampong Keude Baro Rusak Parah 20 Tahun Lebih Tanpa Tersentuh Perbaikan. dari https://www.kanalaceh.com/2024/01/14/miris-jalan-di-gampong-keude-baro-rusak-parah-20-tahun-lebih-tanpa-tersentuh-perbaikan/#google_vignette
- Karo, S. K. P. B. K. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong 2020*.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3),

278–289.

- Maharany, L., & Nugroho, G. W. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(1), 105–123.
- Panigoro, A. N., Kumenaung, A. G., & Walewangko, E. N. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemandirian Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 85–96.
- Rahmitasari, A. N., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–23.
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 -2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 20(1), 105–123.
- Rosmayanti, Haliah, H., & Kusumawati, A. (2023). Pengaruh Pendapatam Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 42–51.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jilid 1 dan 2, Edisi 6*. Salemba Empat.
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Siregar, I. G. (2022). Pengaruh Dau, Dak, Pad Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175.
- Srinofril, W., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2021. *Journal Of Social Science Research*, 3(Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research), 951–964.

Suharyadi, D., Martiwi, R., Karlina, E., Program,), Komputerisasi, S., Amik, A., Bekasi, B., Sitasi, C., Suharyadi, :, Karlina, &, Pengaruh,), Daerah, R., Pengelolaan, D. H., Daerah, K., Dipisahkan, Y., Pad, T., & Bogor, K. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 125.

Supranto, J. (2000). *Statistik teori dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga

Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 22–33.

Uge, F., & Finatariani, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020). ... *Akuntansi Dan Pajak*, 1(3), 339–353.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.

Wisnuwardana, A. G. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–19.

Wulandari, A. P., & Emy, I. (2018). *Pajak dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh

Kabupaten	Kota
1. Kabupaten Aceh Selatan	1. Kota Banda Aceh
2. Kabupaten Aceh Tenggara	2. Kota Sabang
3. Kabupaten Aceh Timur	3. Kota Lhokseumawe
4. Kabupaten Aceh Tengah	4. Kota Langsa
5. Kabupaten Aceh Barat	5. Kota Subulussalam
6. Kabupaten Aceh Besar	
7. Kabupaten Pidie	
8. Kabupaten Aceh Utara	
9. Kabupaten Simeulue	
10. Kabupaten Aceh Singkil	
11. Kabupaten Bireuen	
12. Kabupaten Aceh Barat Daya	
13. Kabupaten Gayo Lues	
14. Kabupaten Aceh Jaya	
15. Kabupaten Nagan Raya	
16. Kabupaten Aceh Tamiang	
17. Kabupaten Bener Meriah	
18. Kabupaten Aceh Jaya	

**Lampiran 2. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli
Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten dan Kota
Provinsi Aceh Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)**

NO	Kabupaten / Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)
1	Kab Aceh Selatan	174.23	134.38	603.24
2	Kab Aceh Tenggara	188.10	98.35	546.65
3	Kab Aceh Timur	234.21	198.20	769.04
4	Kab Aceh Tengah	249.10	193.59	572.05
5	Kab Aceh Barat	271.98	149.93	553.85
6	Kab Aceh Besar	277.25	188.78	759.18
7	Kab Pidie	222.78	214.95	836.28
8	Kab Aceh Utara	323.26	226.83	897.98
9	Kab Simeulue	99.81	96.84	422.32
10	Kab Aceh Singkil	186.44	46.17	409.54
11	Kab Bireuen	235.21	162.16	815.28
12	Kab Aceh Barat Daya	225.27	111.76	415.85
13	Kab Gayo Lues	158.86	58.40	423.66
14	Kab Aceh Jaya	145.31	79.46	397.56
15	Kab Nagan Raya	281.96	109.06	485.04
16	Kab Aceh Tamiang	187.06	125.64	493.79
17	Kab Bener meriah	172.96	70.07	424.58
18	Kab Pidie Jaya	190.75	79.57	410.15
19	Kota Banda Aceh	194.61	227.75	547.63
20	Kota Sabang	136.78	62.41	338.31
21	Kota Lhokseumawe	177.26	65.88	425.31
22	Kota Langsa	177.26	65.88	414.46
23	Kota Subulussalam	141.50	56.85	318.04

**Lampiran 3. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli
Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten dan Kota
Provinsi Aceh Tahun 2021 (dalam Miliar Rupiah)**

NO	Kabupaten / Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)
1	Kab Aceh Selatan	202.38	132.25	595.67
2	Kab Aceh Tenggara	131.50	81.39	539.37
3	Kab Aceh Timur	251.52	122.38	759.51
4	Kab Aceh Tengah	204.45	165.06	565.36
5	Kab Aceh Barat	289.19	134.64	543.83
6	Kab Aceh Besar	215.17	168.82	746.91
7	Kab Pidie	229.11	224.01	823.25
8	Kab Aceh Utara	293.11	178.92	882.66
9	Kab Simeulue	94.01	127.49	419.03
10	Kab Aceh Singkil	160.05	52.82	406.20
11	Kab Bireuen	335.47	173.29	801.25
12	Kab Aceh Barat Daya	197.34	91.76	410.88
13	Kab Gayo Lues	192.71	63.65	419.76
14	Kab Aceh Jaya	171.79	75.58	392.66
15	Kab Nagan Raya	223.27	98.41	477.11
16	Kab Aceh Tamiang	145.25	138.64	488.33
17	Kab Bener meriah	186.03	62.89	417.70
18	Kab Pidie Jaya	179.80	82.37	404.30
19	Kota Banda Aceh	186.43	224.36	539.24
20	Kota Sabang	164.66	57.78	332.13
21	Kota Lhokseumawe	140.43	61.98	418.63
22	Kota Langsa	184.37	109.17	407.52
23	Kota Subulussalam	110.39	57.92	313.86

**Lampiran 4. Data Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli
Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten dan Kota
Provinsi Aceh Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)**

NO	Kabupaten / Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)
1	Kab Aceh Selatan	77.90	117.43	595.94
2	Kab Aceh Tenggara	126.61	23.65	539.84
3	Kab Aceh Timur	157.01	97.86	760.23
4	Kab Aceh Tengah	165.24	176.87	565.67
5	Kab Aceh Barat	252.00	143.50	543.83
6	Kab Aceh Besar	163.20	169.37	746.91
7	Kab Pidie	281.47	225.65	823.25
8	Kab Aceh Utara	340.82	190.94	882.66
9	Kab Simeulue	72.63	77.40	419.89
10	Kab Aceh Singkil	132.91	53.26	407.07
11	Kab Bireuen	255.89	180.78	801.25
12	Kab Aceh Barat Daya	75.30	48.98	411.10
13	Kab Gayo Lues	106.54	63.17	420.43
14	Kab Aceh Jaya	163.48	100.94	393.22
15	Kab Nagan Raya	194.83	101.12	393.22
16	Kab Aceh Tamiang	188.65	125.59	488.96
17	Kab Bener meriah	128.05	59.65	418.06
18	Kab Pidie Jaya	184.25	99.82	404.30
19	Kota Banda Aceh	94.61	209.59	539.24
20	Kota Sabang	114.43	53.88	332.13
21	Kota Lhokseumawe	142.25	67.49	418.63
22	Kota Langsa	124.78	256.92	407.52
23	Kota Subulussalam	245.30	12.36	314.29

Lampiran 5. Output Pengolahan Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	69	12.36	256.92	118.3291
Dana Alokasi Umum	69	313.86	897.98	
Belanja Modal	69	72.63	340.82	187.3700
Valid N (listwise)	69			

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.395	.377	49.37049	1.910

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota

b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	105245.185	2	52622.593	21.589	.000 ^b
	Residual	160871.413	66	2437.446		
	Total	266116.598	68			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Kabupaten/Kota

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	63.388	20.195		3.139	.003	
	Pendapatan Asli Kabupaten/Kota	.060	.146	.057	.411	.682	.474 2.109
	Dana Alokasi Umum	.222	.053	.586	4.217	<.001	.474 2.109

a. Dependent Variable: Belanja Modal